

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Turki merupakan salah satu negara yang sangat menarik untuk dikaji. Termasuk kedalam salah satu negara *transcontinental* yang terletak diantara dua benua yakni, benua Asia dan Eropa. Berada dikawasan yang strategis, alhasil menjadikan Turki sebagai negara yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan ambisinya dalam memperluas dan mempertahankan pengaruh kekuasaannya yang tersisa sejak runtuhnya kekaisaran Ottoman. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dan keaktifan Turki di Kawasan Dunia Internasional salah satunya dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan *Official Development Assistance* (ODA) yang disalurkan melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı*, TİKA). ODA ini kemudian dibuat untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang dengan bantuan pemerintah (OECD, 2020).

Dari tahun ke tahun, dana bantuan Turki terus meningkat dan karena hal ini, Turki tercatat sebagai negara dengan peringkat tertinggi keenam dalam memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA) dan berhasil menggeser negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman serta menjadi negara pendonor dengan peringkat terbesar ketiga dalam proporsi terhadap produk nasional brutonya (GNP). Hal ini dikarenakan Turki mengadopsi model pembangunan yang memprioritaskan

*sincerity, transparency, human-centered approach, responsiveness along fairness, resolution, sustainable partnership dan reciprocity.* Bantuan ODA Turki melalui lembaga TİKA nyatanya berhasil terbentang luas mulai dari wilayah Pasifik, Asia Tengah, Timur Tengah, Balkan, Kaukasia, Amerika Selatan hingga Afrika (Erbay, 2012).

Bantuan pembangunan resmi (ODA) dan bantuan kemanusiaan Turki mencerminkan dirinya sebagai salah satu aktor pembangunan negara yang sukses (E. Fuat Keyman; Onur Sazak, 2014). Sebelumnya, Turki hanyalah sebuah negara penerima bantuan dikarenakan masalah kemiskinan yang terjadi namun sekarang bertransformasi menjadi negara pendonor untuk negara-negara lain. Terlibatnya negara berkembang sebagai pendonor bantuan dalam tatanan hubungan internasional memberikan perubahan yang besar terhadap perkembangan keuangan pembangunan internasional dan mengubah keseimbangan kekuatan didalamnya (Faris Kočan; Jana Arbeiter, 2019). Dalam hal ini, program bantuan Turki (TİKA) yang sudah terealisasi memberikan hasil yang positif dan menciptakan hubungan yang berkelanjutan di berbagai negara, termasuk yang baru-baru ini adalah negara Afrika.

Afrika secara garis besar berperan sangat penting bagi Turki, karena termasuk kawasan yang berpotensi besar untuk maju namun, saat ini masih harus diberikan bantuan kemanusiaan ataupun bantuan pembangunan. Hal ini dilihat dari kegiatan yang dilakukan Turki di tahun 1998 dengan membuat rencana Aksi Inisiatif Afrika demi membangun kembali

hubungan yang lebih baik. Adapun rencana yang dibuat meliputi bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, perdamaian, keamanan, penyelesaian sengketa, mediasi, proyek pembangunan infrastruktur administrasi dan sipil. Pada tahun 2005 KTT Kerjasama Turki-Afrika di deklarasikan dan rencana implementasi bersama tahun 2015-2019 kerap kali dilakukan (Devecioğlu, 2019). Di tahun 2011, Turki menyalurkan bantuan ODA ke Afrika sebesar US\$ 269,78 juta, dimana mayoritas bantuannya ini disalurkan untuk proyek pembangunan di Somalia dan Sudan (Yardimci, 2019).

Sudan sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi area fokus Turki di Kawasan Afrika Utara dan hubungan sejarah antara kedua negara ini sudah terjalin sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari jejak Kesultanan Utsmaniyah yang nyatanya mempengaruhi pembentukan Sudan modern (Devecioğlu, Türkiye, Sudan için neden önemli?, 2019). Sudan juga termasuk negara yang kesulitan dalam mengatasi masalah kemiskinan dikarenakan adanya hutang luar negeri yang sangat besar, ditambah lagi masalah kesehatan dan ketidakmampuan negara ini dalam mengolah sumber dayanya. Kurangnya infrastruktur dan tenaga kerja yang berpendidikan dalam masalah kesehatan menyebabkan meningkatnya angka kematian di negara tersebut. Di tahun 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan melakukan kunjungan ke Sudan serta dari kunjungannya tersebut menghasilkan sebanyak 22 kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebagai salah satu negara yang menjanjikan di

Afrika, Sudan menjadi tujuan Turki untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi. Di samping kunjungannya itu, Presiden Recep Tayyip Erdoğan juga mengunjungi pulau Suakin dan meninjau restorasi (TİKA) di pulau penting yang menjadi bukti peninggalan kekaisaran Ottoman (İpek, 2018). Masalah ekonomi dan kesehatan masih menjadi masalah utamanya, dan saat ini Sudan dihadapkan kembali pada gejala masalah internal politiknya, setelah sebelumnya terjadi perang saudara, pembersihan etnis, pengungsi, genosida, dan masalah lainnya sekarang yang terjadi ialah masalah mengenai penggulingan pemimpin Sudan yakni, Omar al-Bashir dan memakan banyak korban jiwa ketika melakukan perlawanan terhadap pihak militer negaranya (Young, 2020). Setelah berhasil menggulingkan pemimpin Sudan, nyatanya negara tersebut masih tetap dihadapi oleh krisis negara yang kian memburuk.

Krisis yang terjadi di Sudan tentu saja menarik perhatian lebih negara-negara lain yang menjalin kerjasama dengan Sudan, termasuk Turki. Pasalnya, kedua negara sedang menjalin kerjasama yang baik untuk memulihkan pembangunan dan perekonomian Sudan, tercatat pada Maret 2018 lalu Qatar, Turki dan Sudan menandatangani proyek sebesar US\$ 4 miliar untuk pembangunan kembali Pelabuhan Suakin di Laut Merah yang nantinya dapat dijadikan sebagai industri pariwisata (BBC, 2019). Sampai saat ini, kehadiran bantuan luar negeri Turki di Sudan melalui TİKA yang memiliki proyek di berbagai bidang, seperti pertanian, pendidikan, pariwisata, kesehatan, ekonomi, dan akses air bersih khususnya

menimbulkan persaingan terhadap negara-negara utama di Kawasan laut Merah, yakni Arab Saudi, Mesir dan UEA (Amin, 2018). Kawasan Laut Merah ini merupakan salah satu pusat terpenting bagi keamanan Sudan dan negara-negara Arab dikawasan Timur Tengah serta merupakan perpanjangan dari Samudra Hindia yang terletak di antara Semenanjung Arab dan benua Afrika (Acar, 2018). Meskipun Sudan sedang dilanda permasalahan internal yang pastinya akan mengancam negara-negara asing yang sedang menjalin kerjasama dan memberikan bantuan ke Sudan, namun disini nyatanya Turki sendiri masih tetap memberikan bantuan luar negerinya ke Sudan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat di rumuskan suatu pokok permasalahan penelitian, yaitu “*Mengapa Turki tetap memberikan bantuan ODA melalui TIKTA di Sudan?*”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk memudahkan penulis dalam menjawab pertanyaan dari masalah diatas, maka penulis memerlukan kerangka berpikir, dalam hal ini penulis menggunakan:

## 1. Teori Bantuan Luar Negeri

Bantuan Luar Negeri diartikan sebagai kerjasama dengan negara asing atau pihak otonom untuk memajukan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial (Olaniyan, 1996). Kerjasama yang dilakukan nantinya akan menciptakan rasa saling ketergantungan antar pihak. Awalnya, bentuk bantuan luar negeri ini dirancang untuk membantu pihak yang berkonflik dengan bantuan militer dan untuk memperbaiki infrastruktur. Perkembangan mengenai bantuan luar negeri ini dapat dilihat dari dua kejadian pertama, implementasi *Marshall Plan* yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan kedua, dibentuknya Organisasi Internasional yang memiliki pengaruh besar seperti, IMF dan Bank Dunia. Saat ini, bantuan luar negeri dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi khususnya untuk negara-negara miskin dan untuk mengatasi masalah transnasional (Phillips, 2013). Menurut Morgenthau, terdapat enam jenis bantuan luar negeri yakni, bantuan kemanusiaan, penghidupan, militer, suap, pembangunan ekonomi dan martabat (Morgenthau, 1962).

Defenisi luas mengenai bantuan luar negeri ini ialah, kegiatan transfer sumber daya yang dilakukan dari satu pihak ke pihak asing lainnya dengan persyaratan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri negara pendonor. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa uang, material, dan tenaga kerja. Dalam hal ini, pihak yang berperan bisa saja aktor non-negara yang bertindak atas nama negara. Terdapat korelasi antara bantuan dan pertumbuhan ekonomi, namun jika bantuan yang diberikan diterapkan dan

ditempatkan pada lingkungan kebijakan yang baik. Dalam hal ini, terdapat beberapa motif negara dalam memberikan bantuannya, yakni:

1. Untuk menanggapi kebutuhan darurat,
2. Sarana pembangunan, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan,
3. Meningkatkan rasa kepedulian atau solidaritas,
4. Mempromosikan kepentingan komersial dan politik negara pendonor,
5. Adanya ikatan sejarah,
6. Mengurangi dampak buruk yang dihasilkan dari globalisasi,
7. Dan pemberian bantuan hanya tergantung pada catatan hak asasi manusia yang menerima (Andrews, 2009).

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara pendonor ke negara penerima dipengaruhi oleh motif yang beragam sehingga bantuan ini harus dipertimbangkan dengan baik karena akan sangat mempengaruhi bagaimana arus hubungan kedua negara kedepannya. Secara garis besar, motif utama pemberian bantuan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yakni, motif strategis dan politik, motif komersial dan ekonomi serta motif kemanusiaan. Diantara ketiganya, motif strategis (keamanan) dan politik yang paling tampak dan yang seringkali digunakan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi perdamaian, kemajuan, stabilitas atau dukungan pertahanan khususnya bagi negara-negara yang pertahanannya dianggap

penting bagi keamanan negara pendonor. Meskipun motif strategis (keamanan) dan politik menjadi motif yang paling tampak namun, tidak menutup kemungkinan bahwa motif komersial dan ekonomi serta motif kemanusiaan ini dilakukan. Dalam hal untuk mencapai atau mempromosikan motif strategis (keamanan) ini cara yang dilakukan ialah dengan memberikan sebuah bantuan dari negara pendonor ke negara penerima sehingga akan ada hubungan yang saling bergantung antar negara. Lebih singkatnya, jika negara penerima sudah menerima bantuan dari negara pendonor maka, negara pendonor akan mendapatkan kendali atas negara penerima (Mahanta, 1975).

Melihat motif yang dilakukan negara pendonor dalam memberikan bantuannya ke negara penerima dapat disimpulkan berdasarkan poin yang dipaparkan di atas. Turki, sebagai negara pendonor yang belakangan ini sangat aktif memberikan bantuan ke negara-negara berkembang lainnya, termasuk Sudan dipastikan memiliki motif tersendiri dibaliknya. “Bantuan Luar Negeri” dijadikan sebagai alat untuk mencapai visi Turki sebagai negara pendonor serta untuk mempengaruhi kebijakan luar negerinya dengan memberikan bantuan melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA*).

## **2. Motif Bantuan Luar Negeri**

Pada dasarnya, terdapat sebuah motif dari negara pendonor ketika memberikan sebuah bantuan luar negeri (Sen, 2018). Menurut literatur

sendiri bahwa kebanyakan bantuan luar negeri diberikan untuk berbagai macam alasan politik, strategis dan ekonomi yang nantinya akan didapatkan oleh negara pendonor dalam kurun waktu yang lama (Jayathilaka, 2009). Beberapa motif yang dilakukan oleh pendonor dalam bantuan luar negeri, yakni:

1. Motif Kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menunjukkan belas kasih (kepedulian). Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kondisi dan kehidupan yang lebih baik karena kita hidup dalam dunia yang sama.
2. Motif Ekonomi, dapat dilakukan melalui tiga cara pertama, perdagangan untuk membantu negara masuk dalam pasar internasional. Kedua, investasi yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja. Ketiga, kegiatan impor-ekspor yang pastinya akan mempengaruhi perekonomian negara terlebih ketika hal ini terus berlanjut.
3. Motif Strategis, yang terbagi dalam empat indikator, yakni; ikatan, kedutaan, aliansi keamanan, serta perdamaian dan keamanan. Ikatan dilakukan untuk mempererat lagi hubungan antar negara. Kedutaan, merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya perwakilan kedutaan di suatu negara maka akan mempermudah negara dalam merealisasikan tujuannya seperti, membantu negara dalam menangani masalah atau bahkan mempromosikan negara tersebut. Adanya aliansi dan keamanan dilakukan untuk memperkuat keamanan kedua negara, baik itu dengan cara memberikan pasukan, melatih atau membantu mengalahkan kelompok tertentu yang bersimpangan dengan

negara. Perdamaian dan keamanan dalam hal ini, untuk menjaga keamanan negara dan pastinya untuk menciptakan perdamaian.

4. Motif Ideologi, hal ini dilakukan untuk membicarakan tentang nilai-nilai dan sikap politik yang dianggap memiliki kesamaan. Misalnya, negara donor menginginkan negara penerima untuk menjadi negara yang lebih demokratis, ataupun membahas tentang nilai hak asasi manusia yang harus diperjuangkan.
5. Motif Identitas, dilakukan untuk mengungkapkan kekuatan yang dimiliki negara donor dan apa yang pencapaiannya sehingga hal tersebut dapat diterapkan dalam memberikan bantuannya dan hal ini kemudian akan sejalan dengan tujuan kebijakan luar negerinya.
6. Motif Lingkungan, hal ini merupakan motif yang baru mengingat bahwa masalah lingkungan saat ini menjadi perhatian yang lebih. Perubahan lingkungan yang terjadi pastinya memberikan dampak yang luar biasa sehingga, negara donor memberikan bantuan untuk mengurangi dampak tersebut dengan melakukan cara untuk menemukan sumber energi yang terbarukan. Pada dasarnya, masalah dunia bukan hanya dialami oleh satu negara, namun seluruh dunia (Anderson, 2009).

**Gambar 1.1 Skema Motif Alokasi Bantuan**

		Motives					
		Humanitarian	Economical	Strategic	Ideology	Identity	Environment
Motive indicators	Reducing poverty		Trade	Bonding	Politics	Experience and Knowledge	Aid for a better environment
	Showing compassion		Investment Export	Embassies Security Alliances Peace and Security	Values Democracy Human Rights	Political Aims International recognition	International responsibility

Sumber: Master Essay in Political Sciences (Anderson, 2009)

Keadaan Sudan yang diperparah dengan krisis ekonomi, banjir dan wabah penyakit lainnya meningkatkan kesadaran Turki dalam memberikan tanggung jawab dan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi masalah ini. Bagi Turki, Sudan sendiri merupakan negara yang berpotensi sebagai tempat investasi bisnis dan produksi bagi para pengusaha (Tıǧlı, 2019). Setelah kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdoğan di Sudan, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TİKA) memulai pekerjaan restorasi termasuk restorasi pelabuhan di Pulau Suakin Sudan tersebut (Sabah, 2018). Adanya restorasi pelabuhan di Sudan diharapkan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Afrika (stratejik, 2018).

Dalam pemberian bantuan luar negeri Turki ke Sudan, didasarkan pada indikator *reducing poverty, environment* dan *international recognition*. Untuk mewujudkan kekuatan Turki sebagai sebuah negara Islam yang memprioritaskan bantuan pembangunan internasional dilakukan dengan merealisasikan orientasi visi dari Kebijakan Luar Negerinya yang pro-aktif dan berfokus pada peningkatan aspek kemanusiaan serta pembangunan. Dalam memberikan bantuan luar negerinya Turki sendiri selalu menyesuaikan dengan permasalahan apa yang terjadi di negara penerima. Dengan demikian, terdapat kesesuaian mengenai indikator yang ada pada masing-masing motif suatu negara dalam memberikan bantuan luar negerinya.

#### **D. Hipotesa**

Turki tetap memberikan bantuan ODA melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA*) karena adanya:

1. Motif kemanusiaan untuk membantu meringankan masalah di negara penerima dan yang terpenting yakni,
2. Motif identitas untuk menunjukkan kembali kekuatan Turki sebagai pemimpin Dunia Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan menggunakan teori bantuan luar negeri dan konsep motif bantuan luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Turki tetap memberikan bantuan di Sudan dan untuk memahami bagaimana pemberian bantuan luar negeri dijadikan sebagai alat untuk merealisasikan visi kebijakan luar negeri Turki yang proaktif melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA*).

#### **F. Jangkauan**

Dalam penelitian terhadap bantuan Turki melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA*), penulis menggunakan batasan jangka waktu yakni, dari tahun 2011 hingga 2020.

## G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk bentuk bantuan yang diberikan Turki melalui Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı*, TİKA). Pengumpulan data dilakukan dengan analisis data sekunder melalui *library research* yang didapat dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, berita, *report*, dan sumber-sumber elektronik dan website resmi yang berkaitan dengan informasi penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun penelitian ke dalam empat bab dengan topik bahasan masing-masing bab sebagai berikut:

**Bab I** berisi kronologi kejadian latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan kerangka konseptual, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian.

**Bab II** berisi Hubungan Bilateral antara Turki dan Sudan (termasuk profil dan sejarah singkat kedua negara).

**Bab III** berisi secara singkat norma Turki Ustmaniyah dan kebijakan yang dibuat (semenjak pemerintahan Erdogan), krisis yang terjadi di Sudan, informasi lembaga, bantuan serta proyek yang dikerjakan oleh TİKA.

**Bab IV** berisi analisis motivasi bantuan Turki melalui TİKA di Sudan.

**Bab V** berisi kesimpulan dari penelitian dan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.